

**PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI TINJAU DARI PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA METRO (2012-2019)**

**SKRIPSI**

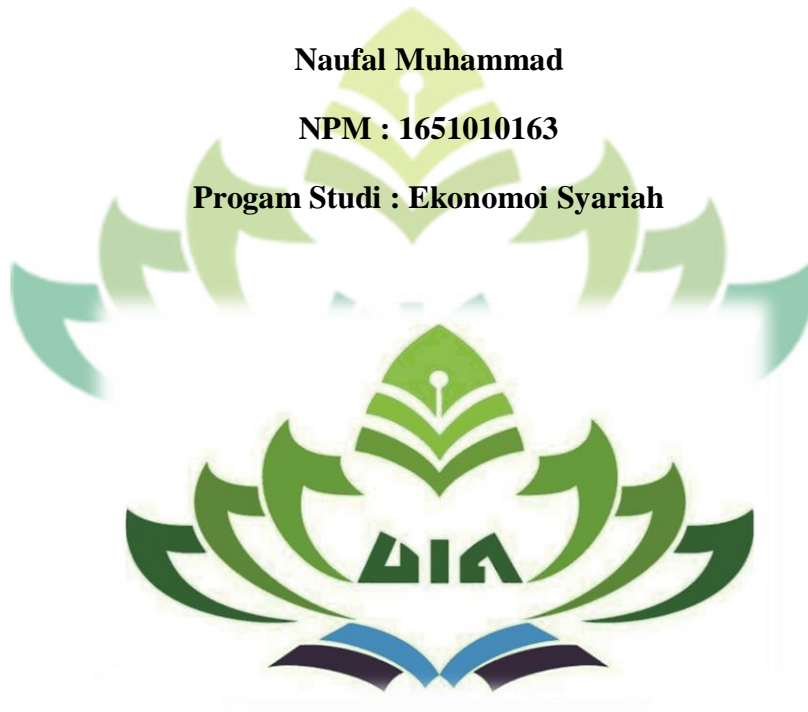
**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh :**

**Naufal Muhammad**

**NPM : 1651010163**

**Progam Studi : Ekonomoi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**1442 H /2020 M**

**PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI TINJAU DARI PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA METRO (2012-2019)**

**SKRIPSI**

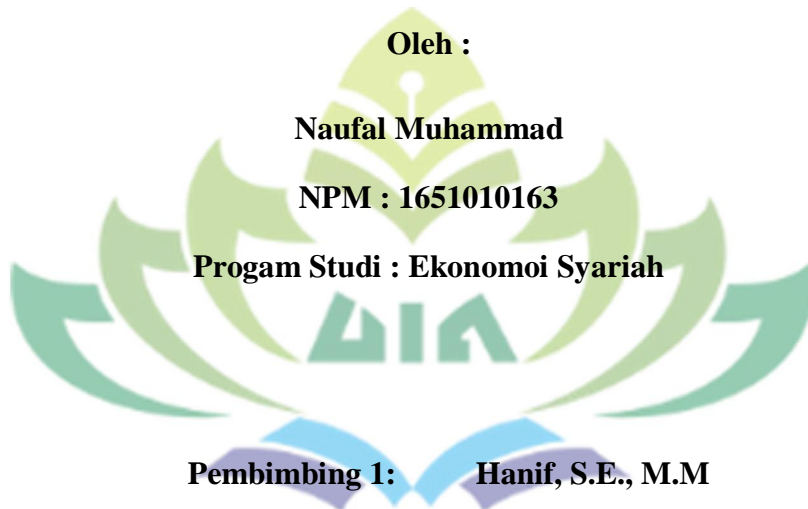
**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh :**

**Naufal Muhammad**

**NPM : 1651010163**

**Progam Studi : Ekonomoi Syariah**



**Pembimbing 1: Hanif, S.E., M.M**

**Pembimbing 2: Dimas Pratomo, S.E.I., M.E**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**1442 H /2020 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan untuk pembangunan memerlukan pendapatan yang dapat diandalkan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu dengan memberikan kesempatan serta keleluasaan secara penuh kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber daya yang tersedia di daerahnya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 dan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 5 ditetapkan bahwa sumber – sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana pembangunan, pinjaman daerah dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Permasalahan penelitian ini : (1) Bagaimana pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD di Kota Metro secara simultan dan parsial? (2) Bagaimana sudut pandang pemungutan pajak restoran dan pajak hotel dalam ekonomi Islam? Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer dan sekunder, data primer berupa wawancara wawancara dengan Bpk. Mirza Marta Hidayat selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengadilan dan beberapa staff Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribus Daerah (BPPRD) di Kota Metro dan data sekunder berupa *time series* yang telah diperoleh dari arsip Pemerintah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro periode 2012–2019. Variable penelitian terdiri dari variable independent yaitu Pajak Restoran ( $X_1$ ) dan Pajak Hotel ( $X_2$ ) dan variable dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial Pajak Restoran ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap PAD (Y) dan Pajak Hotel ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap PAD (Y). Secara simultan uji F Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Dalam pandangan ekonomi islam pemungutan pajak di Kota Metro belum sesuai dengan prinsip yang adil dalam islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD).*





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukaramé, Bandar Lampung (0721)**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA METRO (2012-  
2019)**

**Nama : Naufal Muhammad**

**NPM : 1651010163**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Hanif, S.E., M.M.**  
**NIP.19740823200003001**

**Dimas Pratomo, S.E.I., M.E.**  
**NIP.199305282018011003**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Ekonomi Syariah**

**Madnasir, S.E., M.S.i**  
**NIP.19750424200212001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA METRO (2012-2019)” disusun oleh Naufal Muhammad, NPM. 1651010163**

**Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Juni 2020.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Madnasir, S.E., M.Si.**

**Sekretaris : Vicky F Sanjaya, M.Sc.**

**Penguji I : Deki Fermansyah, S.E., M.Si**

**Penguji II : Hanif S.E., M.M**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.  
NIP. 198 008012003121001**



## MOTTO

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
*Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Al Baqarah: 195)*



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Ir. Arief Joko Arwaka dan ibunda Sri Qodarini, saudariku Nada S.A dan Najwa S.A yang selalu berjuang demi cita-cita dan mimpi putranya, terimakasih atas pengorbanan, kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian berdua. *Amin ya rabba' alamin.*
2. Teman-teman dekatku tersayang Putri Indah Arisandi, Aulia Irfan Apriyanto, M Saifullah, M Rio Fernando, Andika Nurrahman, Andika Nurrohim, Kiki Dwi Vatmala, Hidayatul Jalil, M Lucky L.H, Endang Kurniawan, dan (Robani Club) terima kasih atas kasih sayang, bantuan, dukungan, dan motivasi serta semangat yang kalian berikan.
3. Teman-teman Seperjuanganku Ekonomi Syariah Kelas B Angkatan 2016.
4. Teman-teman Seperjuangan KKN 185 Desa Ngarip Kec. Ulubeu.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Naufal Muhammad, dilahirkan di Kota Metro, pada tanggal 19 April 1998, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ir. Arif Joko Arwoko dan Ibunda Sri Qodardini ini. Bertempat tinggal di Metro Selatan, dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. TK Pertiwi Kota Metro lulus pada tahun 2003
2. SD Pertiwi Teladan Kota Metro lulus pada tahun 2010
3. SMP N 1 Kota Metro lulus pada tahun 2013
4. SMAS TMI Metro Barat lulus pada tahun 2016
5. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syari'ah





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani serta berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA METRO (2012-2019)”**. Shalawat dan salam peneliti sanjungkan kepada tambatan hati panutan cinta kasih yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan kalimat Tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, Amin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dank arena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi dan kritik sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.S.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap dalam kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa mengarahkan dan membimbing mahasiswanya dalam pengajaran yang baik.
3. Bapak Hanif, S.E., M.M selaku pembimbing I, dan Bapak Dimas Pratomo, S.E.I., M.E, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, asisten Dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi, membimbing, membantu, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
5. Kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Badan BPPRD, Kepala Bagian BPPRD, Anggota (Staff) BPPRD Kota Metro yang telah membantu memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.



6. Kedua orang tuaku, adik adikku, sahabat-sahabat terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangat. Semoga Allah SWT senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Teman-teman Seperjuanganku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Kelas B Angkatan 2016 yang selama ini menjadi teman yang baik dalam bertukar informasi, berbagi keluh kesah dan keceriaan.
8. Teman-teman Seperjuangan KKN 185 Desa Ngarip yang selalu mendukung dan bertukar informasi.
9. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyediakan referensi buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan, akan mendapat balasan kebaikan yang lebih besar disisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Bandar Lampung, Mei 2020  
**Penulis**

**Naufal Muhammad**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang .....	5
D. Batasan Masalah.....	16
E. Rumusan Masalah .....	16
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pendapatan Asli Daerah .....	18
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	18
2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah .....	20
3. Sumber Pendapatan Daerah.....	20
a. Pajak Daerah .....	20
b. Retribusi Daerah.....	21
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	



.....	22
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .....	23
B. Konsep Pajak.....	23
1. Pengertian Pajak.....	23
2. Teori Pajak .....	25
a. Teori Ansuransi .....	25
b. Teori Kepentingan.....	26
c. Teori Gaya Pikul .....	26
d. Teori Bakti.....	27
e. Teori Asas Daya Beli .....	27
f. Teori Pembangunan.....	27
3. Fungsi Pajak .....	28
a. Fungsi Anggaran (budgetain).....	28
b. Fungsi Mengatur (cregulerend).....	28
4. Syarat Pemungutan Pajak.....	28
a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) .....	28
b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) .....	29
.....	29
c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) .....	29
d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).....	29
e. System Pemungutan Pajak Harus Sederhana .....	29
5. Pengelompokan Pajak .....	30
a. Menurut Golongannya.....	30
b. Menurut Sifatnya .....	30
c. Menurut Lembaga Pemungutan .....	30
6. Asas Pemungutan Pajak .....	31
a. Asas Domisili .....	31
b. Asas Sumber.....	31
c. Asas Kebangsaan.....	31
7. Sistem Pemungutan Pajak .....	32
a. <i>Official Assesment System</i> .....	32
b. <i>Self Assesment System</i> .....	32
c. <i>Withhiding System</i> .....	32
C. Pajak Hotel .....	33
1. Pengertian Pajak Hotel .....	33
2. Objek Pajak Hotel .....	34
3. Subjek dan Wajib Pajak Hotel .....	35

4. Tarif, Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Besarnya Pokok Pajak Hotel .....	
35	
D. Pajak Restoran.....	36
1. Pengertian Pajak Restoran.....	36
2. Objek Pajak Restoran .....	37
3. Subjek dan Wajib Pajak Restoran .....	37
4. Tarif, Dasar Pengenaan Pajak Restoran dan Besarnya Pokok Restoran.....	
38	
E. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	38
1. Pengertian Pajak Dalam Pandangan Islam.....	38
2. Prinsip-Prinsip Pendapatan dan Pengeluaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	
41	
3. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Ekonomi Islam.....	42
4. Ulama Yang Berpendapat Bahwa Pajak Diperbolehkan.....	44
F. Penelitian Terdahulu .....	46
G. Kerangka Fikir.....	53
H. Hipotesis.....	54

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian.....	59
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	59
2. Sumber Data.....	60
a. Data Primer .....	60
b. Data Sekunder .....	60
3. Teknik Pengumpulan Data .....	61
a. Dokumentasi .....	61
b. Wawancara.....	61
c. Studi Pustaka.....	62
4. Populasi dan Sample .....	62
a. Populasi .....	62
b. Sample.....	63
5. Definisi Variabel Penelitian .....	64
a. Variabel Dependent (variabel terikat (Y)) .....	64
b. Variabel Independent (X).....	64



6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	65
a. Uji Asumsi Klasik .....	65
b. Normalitas .....	65
c. Uji Autokorelasi .....	66
d. Multikorelasi .....	66
e. Heteroskedasitas.....	67
f. Analisis Regresi Linier Berganda .....	67
g. Uji Statistika.....	68



#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	72
1. Gambaran Umum Kota Metro.....	72
2. Visi Misi Kota Metro .....	74
3. Kondisi Geografis .....	75
4. Luas Wilayah dan Batas-Batas Wilayah Administrasi Kota Metro..	75
5. Kondisi Ekonomi Daerah.....	77
a. Pertumbuhan Ekonomi.....	77
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro .....	
.....	
78	
B. Gambaran Hasil Penelitian.....	79
1. Pajak Restoran.....	79
2. Pajak Hotel .....	80
3. Pendapatan Asli Daerah .....	81
4. Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	
.....	
82	
C. Analisis Data .....	82
1. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	82
a. Uji Normalitas .....	82
b. Uji Autokorelasi .....	83
c. Uji Multikorelasi .....	85
d. Heteroskedastisitas.....	86
e. Analisis Linier Berganda.....	88
f. Uji Hipotesis.....	90
1) Uji Signifikan Parametrik Individu (Uji T) .....	90
2) Uji Signifikan Simultan (F).....	92
3) Uji Koefisien Determinasi.....	94
D. Pembahasan.....	95
1. Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro Periode 2012-2019 .....	
.....	
95	
2. Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro Periode 2012-2019.....	



3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pajak di Kota Metro .....	98
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	104

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2012 – 2019.....	10
2. Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Metro Tahun 2012 – 2019.....	11
3. Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Metro Tahun 2012 – 2019.....	12
4. Tabel 1.4 Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Kota Metro Tahun 2012 – 2019.....	14
5. Tabel 2.1 Kerangka Berfikir.....	53
6. Tabel 3.1 Data Realisasi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro 2012-2019.....	63
7. Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Metro .....	76
8. Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro, Provinsi dan Nasional Tahun 2012-2019 .....	78
9. Tabel 4.3 Kota Metro Tahun 2012 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran– 2019.....	79
10. Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Metro Tahun 2012 – 2019.....	80
11. Tabel 4.5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2012 – 2019.....	81
12. Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2012 – 2019 .....	82

13. Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas .....	83
14. Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	84
15. Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas .....	85
16. Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas .....	87
17. Tabel 4.11 Hasil Uji Linier Berganda .....	88
18. Tabel 4.12 Uji Parsial (t) .....	91
19. Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan (F) .....	93
20. Tabel 4.14 Hasil Koefisien Determinasi.....	95

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kerangka Fikir Dalam Penelitian Ini Dapat Digambarkan .....	53
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Persetujuan Pembimbing Akademik .....	109
Lampiran 2: Balasan Kesbangpol Kota Metro .....	110
Lampiran 3: Surat Balasan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro.....	111
Lampiran 4: Berita Acara.....	112
Lampiran 4: SK Munakosah .....	113
Lampiran 5: Kartu Konsultasi.....	114
Lampiran 4: Pedoman Wawancara .....	114
Lampiran 5: Perwali.....	115
Lampiran 6: Hasil Output SPSS 25.....	120
Lampiran 5: Dokumentasi Dengan Kepala Badan BPPRD, Bendahara BPPRD, Kepala Bidang BPPRD, dan Anggota BPPRD .....	117



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk memudahkan serta memahami proosal ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal ini. Berdasarkan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul **“PENGARUH PAJAK RETORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya yang ada dari sesuatu, baik orang atau pun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>1</sup>
2. Pajak adalah kontribusi wajib bagi setiap negara yang terutang terhadap wajib pajak baik pribadi maupun badan yang bersifat



---

<sup>1</sup> Debdikbut, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h.1031.

memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara.<sup>2</sup>

3. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.<sup>3</sup>
4. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang organisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman.<sup>4</sup>
5. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.<sup>5</sup>
6. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>6</sup>
7. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang pungut berdasarkan

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Andi OFFSET, 2011), h.23.

<sup>3</sup> Arif Joko Arwoko, *Himpunan Peraturan Walikota Metro Tentang Tata Letak Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet*, (Kota Metro : Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD), 2018), h. 4.

<sup>4</sup> M.W Atmodjo, *Restoran dan Segala Permasalahan*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h.7.

<sup>5</sup> Edward W. Memah, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado, *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3 Juni 2013, h. 721-729.

<sup>6</sup> Kepala Badan BPPRD, *Himpunan Peraturan Walikota Metro Tentang Tata Letak Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet*, (Kota Metro : Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD), 2018), h. 4.



peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

8. Perspektif adalah sudut pandangan; pandangan.<sup>8</sup>
9. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah – masalah ekonomi rakyat yang penerapannya dengan nilai – nilai Islam.<sup>9</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan subjektif :

### **1. Alasan Objektif**

Secara objektif ada beberapa hal yang menjadi alasan peneliti yaitu berlandaskan fenomena yang terjadi yaitu:

- a. Pajak Restoran Kota Metro mengalami fluktuasi, Pada tahun 2012 sebesar Rp.543.701.484,00 atau 120,82%, dan di tahun 2013 sebanyak Rp.553.700.312,00 atau 110,74%, dan di tahun 2014 sejumlah Rp.591.062.170,00 atau 84,44 tahun 2015 sebesar Rp. 745.034.436,00 atau 106,43%. Ditahun 2016 sebesar Rp. 806.066.997,00 atau 107,43%. Tahun 2017 pada angka Rp.873.889.095,00 atau 109,06%. Tahun 2018 sebesar

---

<sup>7</sup> Deddy Supriyady Baratakusuma dan Dadang Salihin, *Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002, h. 173.

<sup>8</sup> Kosasi, Eva Maria S dan Abdul , Eva Maria S dan Abdul Yusuf , *Analisis Sistem Pajak BHTB Dari Pajak Pusa Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang*, Majalah Ilmiah Solusi Unsika, Vol 11 Edisi 24 Sep-Nov 2012, h. 2.

<sup>9</sup> Mustofa Edwin Nasution, et.al, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, cat. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.15

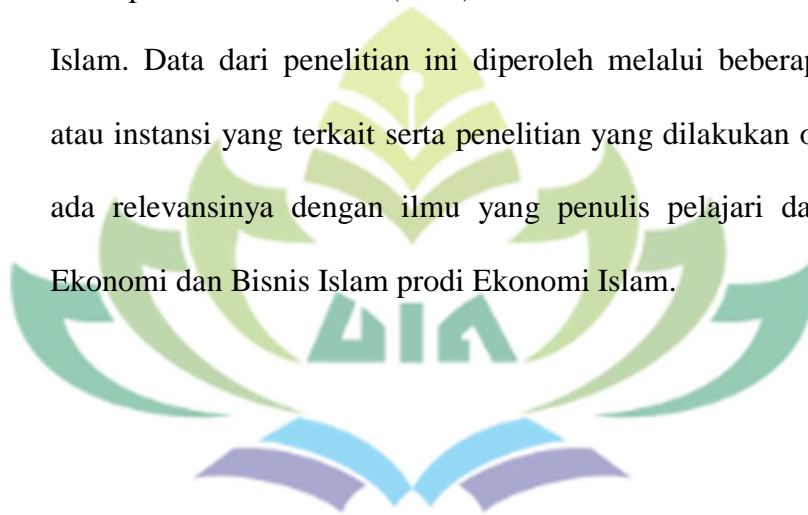
Rp.1.506.068.615,00 atau 125,51% dan Tahun 2019 sejumlah Rp.2.457.974.273,00 atau 117,06%.

- b. Pajak Hotel Kota Metro mengalami fluktuasi dan Pada tahun 2012 sebesar Rp.45.509.500,00 atau 75,85%, lalu di tahun 2013 sejumlah Rp.69.602.000,00 dengan persentase 116,00%, selanjutnya di tahun 2014 senilai Rp.103.961.000,00 atau 138,61 dan di tahun 2015 sebesar Rp.118.764.250,00 atau 125,02%, di tahun 2016 sejumlah Rp.244.880.877,00 atau 153,05%, selanjutnya tahun 2017 sejumlah Rp.271.797.466,00 atau 108,72%, lalu tahun 2018 sebesar Rp.303.962.392,00 atau 101,32%, dan ditahun 2019 sejumlah Rp.332.867.027,00 atau 92,46%.

- c. Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 Rp. 57.390.344.132,55 atau 111,42, di tahun 2013 Rp. 73.762.880.226,69 atau 117,35, lalu tahun 2014 Rp. 97.421.477.067,36 atay 111,29 Pada tahun 2015 sebesar Rp. 127.566.680.290,11 atau 120,53%, di tahun 2016 sejumlah Rp. 113.980.279.167,58 atau 97,41%, selanjutnya tahun 2017 sejumlah Rp. Rp. 138.766.022.894,45 atau 94,99%, lalu tahun 2018 sebesar Rp. 132.202.276.039,19 atau 94,26%, dan ditahun 2019 sejumlah Rp. 176.193.193.438,39 atau 106,55%.

## **2. Alasan Subjektif**

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang potensi penerimaan daerah dari pungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, dengan salah satu visi Kota Metro meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata yang berbasis keluarga, dalam hal ini sudahkah efektif atau belum dan seberapa banyak pengaruh yang di berikan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro dari sudut pandang Islam. Data dari penelitian ini diperoleh melalui beberapa lembaga atau instansi yang terkait serta penelitian yang dilakukan oleh penulis ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Islam.



### C. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumberdaya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber – sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.<sup>10</sup> Tujuan kebijakan otonomi daerah adalah untuk mendorong daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien, yaitu dengan peningkatan peran serta, prakasa, dan pembayaran masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan keluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>11</sup>

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan untuk pembangunan memerlukan pendapatan yang dapat diandalkan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu dengan memberikan kesempatan serta keleluasaan secara penuh kepada daerah untuk

---

<sup>10</sup> Jovanly Atteng, Danid Saerang, Lidya Mawikere, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015*, Jurnal Berkala Efisiensi, Vol. 16, No. 4, 2016.

<sup>11</sup> Jovanly Atteng, Danid Saerang, Lidya Mawikere, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015*, Jurnal Berkala Efisiensi, Vol. 16, No. 4, 2016.



menyelenggarakan otonomi daerahnya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber daya yang tersedia di daerahnya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 dan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 5 ditetapkan bahwa sumber – sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana pembangunan, pinjaman daerah dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam teori pembangunan ekonomi yaitu menurut Adam Smith dalam pembangunan ekonomi modal memegang peran penting<sup>12</sup>, salah satu contoh PAD adalah pajak daerah yang dipungut dari sektor pajak. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber keuangan sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom.<sup>13</sup> Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari Pendapatan asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang terdapat dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

---

<sup>12</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional edisi Revisi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 47.

<sup>13</sup> Rosana Purba, Rika Mei Hayani Ginting, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Jurnal Mutiara Akuntansi No. 1 Vol 1, 2014*.

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah maka dapat dikatakan semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber PAD.<sup>14</sup> Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi PAD dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan lain – lain yang diterima daerah. Keadaan ini menyebabkan perlunya dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah harus ditingkatkan, maka daerah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif didalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.<sup>15</sup>

Pajak merupakan pemasukan Negara terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali berguna untuk pembiayaan berbagai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, begitu pula dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang – undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang No. 16 tahun

---

<sup>14</sup> Aji R Ramadhani, Fidiani, *Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah pajak Online*, Jurnal Ekonomi / Volume XXIII, No. 03, 2018, h. 273.

<sup>15</sup> Nio Anggun Sripradita, Tipowijono, Achmad Husaini, *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)*, Jurnal e-Perpajakan, No. 1 Vol1, 2014

2009. Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang – undang.<sup>16</sup>

Sumber – sumber pendapatan daerah antara lain : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM), Bea Marerai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan untuk Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu: Pajak Provinsi, terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>17</sup> Untuk membiayai program – program pembangunan pemerintahan baik sektor fisik maupun non-fisik, maka dibutuhkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan pra-survey penelitian lapangan tepatnya di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, peneliti ini mewawancarai Ibu Nuraini salah satu staff dibagian Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Menurut beliau bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai

---

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Perpajakan edisi terbaru 2016*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 3.

<sup>17</sup> Ibid, h 15.

penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, serta dalam kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pengeluaran atau belanja negara itu meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Pemerintah Daerah. Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. Sedangkan sumber penerimaan Negara terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan Perpajakan pada dasarnya terdiri dari penerimaan pajak luar negeri.<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan Bapak Mirza Marta Hidayat selaku Kabid Pembukuan dan Pengadilan, beliau menjelaskan sedikit tentang pajak hotel dan restoran, menurut BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga omotel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, periwisata, pesanggaan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak restoran pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Nuraini selaku staf bagian Kasub bagian Umum dan Kepegawaian, 20 Januari 2020.



katin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>19</sup> Pemerintah Kota Metro dalam usaha mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dengan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan asli daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaiannya realisasi secara konsisten. Berikut data target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Metro tahun 2012 – 2019.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Metro Tahun 2012 – 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>%</b>
2012	51.507.298.898,00	57.390.344.132,55	111,42
2013	62.343.732.295,09	73.762.880.226,69	117,35
2014	87.539.079.103,00	97.421.477.067,36	111,29
2015	105.835.700.554,09	127.566.680.290,11	120,53
2016	117.010.000.000,00	113.980.279.167,58	97,41
2017	146.081.781.599,00	138.766.022.894,45	94,99
2018	140.252.887.543,00	132.202.276.039,19	94,26
2019	154.118.468.313,69	176.193.193.438,39	106,55

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro*

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa pada tabel diatas adalah penerimaan realisasi Pendapatan Asli daerah dan mengalami fluktuasi. Pada tahun

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Mirza Marta Hidayat selaku Kepala Bagian dibagian Pembukuan dan Pengendalian, 20 Januari 2020

2012 sejumlah Rp.57.390.344.132,55 atau 111,42, di tahun 2013 senilai Rp.73.762.880.226,69 atau 117,35, lalu tahun 2014 sebesar Rp.97.421.477.067,36 atau 111,29 Pada tahun 2015 sebesar Rp.127.566.680.290,11 atau 120,53%, di tahun 2016 sejumlah Rp.113.980.279.167,58 atau 97,41%, selanjutnya tahun 2017 sejumlah Rp.138.766.022.894,45 atau 94,99%, lalu tahun 2018 sebesar Rp.132.202.276.039,19 atau 94,26%, dan ditahun 2019 sejumlah Rp.176.193.193.438,39 atau 106,55%.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel**  
**Kota Metro Tahun 2012 – 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2012	60.000.000,00	45.509.500,00	75,85
2013	60.000.000,00	69.602.000,00	116,00
2014	75.000.000,00	103.961.000,00	138,61
2015	95.000.000,00	118.764.250,00	125,02
2016	160.000.000,00	244.880.877,00	153,05
2017	165.000.000,00	271.797.466,00	108,72
2018	300.000.000,00	303.962.392,00	101,32
2019	360.000.000,00	332.867.027,00	92,46

*Sumber: Badan Pusat Statis (BPS) dan Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro*

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa pada tabel diatas adalah penerimaan realisasi pajak hotel dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 sebesar

Rp.45.509.500,00 atau 75,85%, lalu di tahun 2013 sejumlah Rp.69.602.000,00 dengan persentase 116,00%, selanjutnya di tahun 2014 senilai Rp.103.961.000,00 atau 138,61 dan di tahun 2015 sebesar Rp.118.764.250,00 atau 125,02%, di tahun 2016 sejumlah Rp.244.880.877,00 atau 153,05%, selanjutnya tahun 2017 sejumlah Rp.271.797.466,00 atau 108,72%, lalu tahun 2018 sebesar Rp.303.962.392,00 atau 101,32%, dan ditahun 2019 sejumlah Rp.332.867.027,00 atau 92,46%.

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran**  
**Kota Metro Tahun 2012 – 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2012	450.000.000,00	543.701.484,00	120,82
2013	500.000.000,00	553.700.312,00	110,74
2014	700.000.000,00	591.062.170,00	84,44
2015	700.000.000,00	745.034.436,00	106,43
2016	750.000.000,00	809.066.997,00	107,88
2017	801.300.000,00	873.889.095,00	109,06
2018	1.200.000.000,00	1.506.068.615,00	125,51
2019	2.099.800.559,00	2.457.974.273,00	117,06

*Sumber: Badan Pusat Statis (BPS) dan Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro*

Berdasarkan tabel diatas yaitu data penerimaan realisasi pajak restoran di Kota Metro mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sebesar Rp.543.701.484,00 atau 120,82%, Lalu di tahun 2013 sebanyak Rp.

553.700.312,00 atau 110,74%, dan di tahun 2014 sejumlah Rp.591.062.170,00 atau 84,44 tahun 2015 sebesar Rp. 745.034.436,00 atau 106,43%. Ditahun 2016 sebesar Rp. 806.066.997,00 atau 107,43%. Tahun 2017 pada angka Rp.873.889.095,00 atau 109,06%. Tahun 2018 sebesar Rp.1.506.068.615,00 atau 125,51% dan Tahun 2019 sejumlah Rp.2.457.974.273,00 atau 117,06%.

Dalam Upaya menciptakan kemandirian daerah pajak daerah Kota Metro yaitu pajak restoran dan pajak hotel telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan persentase sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kota Metro Tahun 2012 – 2019**

TAHUN	PAJAK RESTORAN	PAJAK HOTEL
	(%)	(%)
2012	0,95	0,08
2013	0,75	0,09
2014	0,61	0,11
2015	0,60	0,09
2016	0,71	0,21
2017	0,63	0,20
2018	1,14	0,21
2019	1,40	0,23

*Sumber: Badan Pusat Statis (BPS) dan Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro*

Pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah,



Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Jumlah Penduduk muslim di Indonesia merupakan jumlah terbesar di dunia. Dengan jumlah muslim di Indonesia tentu berkorelasi dengan berbagai jumlah nilai kewajiban yang berhubungan dengan harta. Sebagai warga negara Indonesia, umat islam juga memiliki kewajiban dalam membayar pajak bagi yang sudah memenuhi syarat., karena telah dibuat undang – undang yang mewajibkan itu.

Aturan ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut Yusuf Qardhawi (1973) Pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluarannya umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan – tujuan lain yang dicapai oleh negara.

Sedangkan, menurut Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang sifatnya mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan

dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntunan politik keuangan bagi pemerintah.<sup>20</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. An Nisa 4(59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu,.....”*

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya sebagai manusia harus taat kepada Allah SWT yakni menjalankan perintah – Nya dan menjauhi larangannya – Ny, kepada Rasulullah SAW yakni yang dituliskan dengan membawa risallah dari Allah SWT yang wajib di taati, menaati Rasulullah sama dengan menaati zat yang mengutusny Allah SWT, yang terakhir taat kepada ulil amri, sebagai umat manusia tidak hanya patuh terhadap terhadap Tuhan dan Rasul kita melainkan kepada pemimpin juga seperti pemerintah. Salah satu contoh patuh kepada pemerintah yaitu dengan membayar pajak, semakin masyarakat taat membayar pajak maka akan semakin membantu untuk pendapatan kas negara dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Ketaatan kepada pemerintah dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan kewajiban dalam membayar pajak juga sama halnya taat kepada agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat. Maka dari itu timbul masalah dan hambatan mengenai persepsi kewajiban umat islam dalam pajak dan zakat :

---

<sup>20</sup> Nur Kholis, “Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Malaysia, 2010, h. 19.

1. Pajak adalah penarikan atau iuran oleh negara terhadap warga negara terhadap warga negara tetapi penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi kepentingan warga negara seluruhnya. Sedangkan zakat adalah tranfer pendapatan kekayaan dari orang – orang yang kaya kepada yang kurang mampu (miskin) dan juga yang membutuhkan kemaslahatan dan perkembangan agama.
2. Pajak (kharaj) memang ada yang hanya dikenakan kepada non muslim.<sup>21</sup> Masalah lain ialah banyak muslim yang keberatan dalam melakukan kewajiban yakni membayar pajak dan zakat .

Walapun penduduk muslim menyadari akan halnya zakat adalah kewajiban agama yang penyalurannya harus sesuai ketentuan dalam Al Quran Surah At Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yangdibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Kota Metro memiliki sumber pendapatan asli daerahnya yaitu pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam mengoptimalisasi Sumber yang ada di Kota Metro apakah pemerintah daerah dapat mengendalikan sumber tersebut dalam perbaikan

---

<sup>21</sup> Muhammad Turmudi, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)*, Jurnal Al\_AdI, Vol.8, No.1, 2015, h. 131.

admiinistrasi dan pelayanan pajak sudah terealisasi dengan baik, guna untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan pandangan islam?

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis tertarik menyusun tugas akhir untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Restoran dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro (2012 – 2019)”**

#### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan Pajak Restoran dan Hotel Secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Ekonomi Islam di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di Kota Metro (2012 – 2019) dikarenakan data yang diperoleh terbatas

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD di Kota Metro secara simultan dan parsial?
2. Bagaimana sudut pandang pemungutuan pajak restoran dan pajak hotel dalam ekonomi Islam?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui berpengaruh atau tidak pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD di daerah Kota Metro secara simultan dan parsial.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak restoran dan pajak hotel dalam pandangan Islam.

#### **G. Manfaat penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya tentang bagaimana pajak restoran dan hotel dalam meningkatkan PAD di Kota Metro serta bagaimana pajak restoran dan pajak hotel dalam pandangan ekonomi islam. Selain itu, untuk mendalami ilmu yang telah didapatkan penyusunan selama duduk dibangku kuliah sehingga dapat mengaplikasikan teori dalam masalah – masalah yang tertera.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak – pihak yang ingin mengenai pengetahuan tentang peranan pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan Kota Metro. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam



pembangunan ekonomi di Kota Metro dan menambah pengetahuan terkait pajak dalam konteks syariah.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber – sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

##### **1. Pengertian Pendatan Asli Daerah**

Menurut Halim Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena mealalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah,

Menurut Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah

adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Menurut Atep Adya Barata dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Mardiasmo mengemukakan pengertian Pendapatan Asli daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri yang perlu ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa, Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya dapat dipaksakan karena adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.

Dari uraian diatas maka pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada pada suatu daerah. Agar menjadi daerah yang mandiri maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah itu sehingga terciptanya peningkatan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.<sup>22</sup>

## **2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **3. Sumber Pendapatan Daerah**

### **a. Pajak Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 65 Tahun 2001, Pajak daerah adalah Iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang –

---

<sup>22</sup> Anid Inag Rum, Sisfianne Romadine S, *Peranan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat*, (TEDC Bandung: Vol. 9 No.3, September 2015). h 219

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah.<sup>23</sup>

Menurut Marihot pajak daerah ialah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan pandangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah<sup>24</sup>

Terkait definisi diatas, pajak daerah merupakan pajak yang berasal dari daerah, dan iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah sebagai bentuk kontribusi tanpa adanya imbalan langsung, yang diberikan oleh undang – undang yang bersifat memaksa.

#### **b. Retribusi Daerah**

Menurut Mardiasmo retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Ramlan (2016) retribusi daerah adalah imbalan atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau

---

<sup>23</sup> TIM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, *Pedoman Nasional Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Departemen Keuangan, 2009), h. 11

<sup>24</sup> Maribot Pahala Siahanaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 7



badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.<sup>25</sup>

Menurut Ahmad Yani retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Saragih adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>26</sup>

Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasannya retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk iuran yang dipungut dan langsung mendapatkan imbalan atas pembayaran retribusi tersebut.

#### **c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisahkan dari

---

<sup>25</sup>Rubiyanto dan Rahayu, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokero Periode 2013-2017*, Jurnal Majalah Ekonomi, Vol. XXIV, No. 1, 2017, h. 95

<sup>26</sup>Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 63

pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.<sup>27</sup> Undang – Undang No. 3 Tahun 2014 mengklarifikasi jenis hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.<sup>28</sup>

#### **d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Menurut Undang – Undang No. 34 tahun 2004 menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemadatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntunan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.<sup>29</sup>

### **B. Konsep Pajak**

---

<sup>27</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 73 - 74

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>29</sup> Aries A Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, (Bogor : Ghalia Indonesia), h. 99

## 1. Pengerian Pajak

UU No. 6 Tahun 1983 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) merupakan ketentuan formal perpajakan yang mengatur tatacara melaksanakan penyetoran dan pelaporan pajak hak dan kewajiban Wajib Pajak serta Wewenang Direktur Jendral Pajak. Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU KUP adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.<sup>30</sup>

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negaraberdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam

---

<sup>30</sup> Wirawan B. Ilyas, Rudi Suharto, *PERPAJAKAN Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 3

penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adrian, Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *publik investment*.<sup>32</sup>

Dari definisi tersebut, pajak ialah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat atau warga negara atas sebagian harta yang dimiliki yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung.

---

<sup>31</sup> Andrian Sutedi, S.H.,M.H. *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). h. 1

<sup>32</sup> Ibid, h. 2

## 2. Teori Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

### a. Teori Asuransi

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan, serta keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi.

### b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing – masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.<sup>33</sup>

### c. Teori Gaya Pikul

Teori ini pada hakikatnya menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya yaitu dalam

---

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h. 34



bentuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini, diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut dalam bentuk pajak. Yang menjadi dasar teori ini adalah rasa keadilan yaitu beban pajak setiap orang harus sama. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul tersebut dapat diukur dengan melihat besarnya penghasilan dan kekayaan atau melebihi pengeluaran dan pembelanjaan seseorang.<sup>34</sup>

#### **d. Teori Bakti**

Dasar kepentingan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

#### **e. Teori Asas Daya Beli**

Dasar keadilan terletak akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih dituntaskan<sup>35</sup>

#### **f. Teori Pembangunan**

<sup>34</sup> Adrian Sutedi, *Hukum.....*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 31

<sup>35</sup> Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2016), h. 6

Terkait Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam artian masyarakat yang adil dan makmur.<sup>36</sup>

### 3. Fungsi Pajak

Dilihat dari definis pajak diatas, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Ada dua fungsi pajak, yaitu:

#### a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran.

#### b. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras; Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.<sup>37</sup>

### 4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, *Hukum.....*, (Jakarta Sinar Grafika, 2013), h. 35

<sup>37</sup> Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, *Perpajakan.....*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2016),

**a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

**b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)**

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

**c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)**

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan keesuan perekonomian masyarakat.

**d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)**

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

**e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh: Bea Materai disederhanakan 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif; Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%; dan lain-lain.

## **5. Pengelompokan Pajak**

### **a. Menurut golongannya**

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

### **b. Menurut sifatnya**

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam artian memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertsmbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea MaTerai. Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan lain-lain.
- b) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan dan lain-lain.

### 6. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak.

- b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

- c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## 7. Sistem Pemungutan Pajak

### a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### c. *Withholding System*



Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang berangkutan) untuk memotong dan memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### C. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak:

#### 1. Tarif Sebanding/proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapaun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 10%

#### 2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

### 3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

### 4. Tarif degredasi

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak makin besar.

## D. Pajak Hotel

### 1. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro No. 38 Tahun 2018, menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksanaa Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet. Pada BAB I Pasal 1 ayat 14 dan 15, bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud hotel fasilitas penyediaan jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persanggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, *Himpunan Peraturan Walikota Metro Tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet*, (Kota Metro: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah : 2019), h.4

Menurut Sugianto pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan untuk menginap atau istirahat yang dipungut bayaran. Maka pajak hotel timbul karena adanya pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Pahala memaparkan dan menjelaskan tidak hanya hote yang dipungut pajak hotel namun juga mencakup motel, gubuk parawisata, losmen, wisma parawisata, persanggahan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.<sup>39</sup>

## 2. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah koos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Sedangkan yang dimaksud dengan fasillitas jangka pendek, antara lain gubug pariwisata (*cottage*), motel, wisma parawisata, persanggahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.
- c. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain: telpon, fakimil, teleks, fotokopi,

---

<sup>39</sup> I Gede Sudarsaba.dkk, *Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018*, (Jurnal Akuntansi Profesi, Vol.10 No.2, Desember 2019, h. 102

pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkut lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.

- d. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan atau dikelola hotel.
- e. jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

Dikecualikan dari objek pajak hotel adalah:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan dihotel yang dipegunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum dihotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

### **3. Subjek dan Wajib Pajak Hotel.**

Menurut Undang-Undanng Nomor 28 Tahun 2009, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan

Hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.<sup>40</sup>

#### **4. Tarif, Dasar Pengenaan Pajak Hotel, dan Besarnya Pokok Pajak Hotel.**

Tarif pajak hotel paling tinggi 10%. Daerah dapat menetapkan sendiri tarif pajak hotel sesuai kebijakan daerah sepanjang tidak melebihi 10% dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak hotel.

### **E. Pajak Restoran**

#### **1. Pengertian Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro No. 38 Tahun 2018, menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksanaa Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet. Pada BAB I Pasal 1 ayat 16 dan 17, bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud restoran fasilita penyediaan makanan dan/atau minum dengan dipungut

---

<sup>40</sup> Avid Inang Rum, Sisfiane Romadine Susila, “*PERANAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT*”, TEDC: Vol.9, No.3, (September 2015). h. 225 U

bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering.<sup>41</sup>

Menurut Menurut Sugianto “Restoran adalah tempat menyantap makana dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran”. Pahala menjelaskan pengenaan pajak restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan katering.<sup>42</sup>

## 2. Objek Pajak Restoran.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/dirumah makan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran/dirumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

Dikecualikan dari objek pajak restoran adalah:

- a. Pelayanan usaha jasa boga/katering.

---

<sup>41</sup> Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, *Himpunan Peraturan Walikota Metro Tentang Tata Laksana Pemungutan.....*, (Kota Metro: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah : 2019), h.4

<sup>42</sup> I Gede Sudarsaba Dkk, *Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran .....*, (Jurnal Akuntansi Profesi, Vol.10 No.2, Desember 2019, h. 102



- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

### 3. Subjek, Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada peraturan restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran.

### 4. Tarif, Dasar Pengenaan, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Tarif pajak restoran paling tinggi 10%. Daerah dapat menetapkan sendiri tarif pajak restoran sesuai kebijakan daerah sepanjang tidak melebihi 10% dan diterapkan dalam peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak restoran.<sup>43</sup>

## F. Konsep Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Pajak dalam pandangan islam.

Secara etimologi, pajak dalam bahas Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain, Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata

---

<sup>43</sup> Kepala BPPRD Kota Metro, *Himpunan Peraturan Walikota Metro Tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran,.....* (Kota Metro: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah : 2019), h.5

*da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S Al-Baqarah (2): 61.:

....وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ .... ٦١

Artinya: .... Lalu ditimpahkan kepada mereka nista dan kehinaan....

*Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaib* (ضرائب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-daraaib* (الضرائب مسلحة).

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. . Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya dikategorikan *dharibah*.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (July 31, 2017): 166–77, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

Ada tiga ulama yang mendefinisikan tentang pajak yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iktishad al-islami az-Zakah wa ad-Dharibah* dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

Gazi Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan dialokasikan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.<sup>45</sup>

Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* di antaranya adalah :

- a. *Al-jizyah* ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam.
- b. *Al-Kharaj* ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara islam.

---

<sup>45</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta): PT. Raja Grafindo Persada, 2007. h 31-

- c. *Al-Usyur* ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.<sup>46</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih tepat dan dekat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah Swt,
- b. Obyeknya harta,
- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya,
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka, dan
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

## 2. Prinsip – Prinsip Pendapatan dan Pengeluaran dalam perspektif Ekonomi Islam

Sebagaiman halnya penerimaan negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati Ulil Amri penerimaan negara yakni sebagai berikut:

- a. Harus adanya nash dari Al-Qur‘an dan Al-Hadist yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non muslimin.

---

<sup>46</sup> Gazali, “ *PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*”, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah): Vol. VII, No. 1, 2015. h 95

- c. Harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.

Prinsip pajak yang adil menjelaskan bahwa pajak daerah harus memberikan keadilan baik secara vertikal yang artinya sesuai dengan tingkat sosial kelompok masyarakat ataupun adil secara horizontal yaitu berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan ini dijelaskan dalam Q.S An-Nahl,(16):90 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾



*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabar dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran .<sup>47</sup>*

Adapun prinsip pengeluaran negara menurut negara sistem ekonomi islam sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT,
- b. Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungutan.
- c. Adanya pemisah antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta.
- d. Pengeluaran negara harus hemat.<sup>48</sup>

### **3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Ekonomi Islam**

Kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari tinjauan ekonomi islam, khususnya dalam pendistribusian Indonesia. Kepatuhan wajib pajak kaitannya dengan Zakat. Dimana kepatuhan wajib pajak sesuai dengan ekonomi islam berdasarkan nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut:

- a. Nilai Kesadaran

Kesadaran untuk menunaikan wajib pajak bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat sejahtera.

---

<sup>47</sup> Kementrian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro 2014), h 152

<sup>48</sup> Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta):Rajawali Pers, 2007. h.121-13



Hal ini karena membayar kewajiban-kewajiban membayar pajak merupakan proses utama dalam sistem keuangan negara dan sejalan dengan konsep distribusi islam. Dimana uang negara guna mensejahterakan masyarakat bukan untuk mensejahterakan kalangan atas.

b. Nilai Kewajiban

Nilai kewajiban dalam membayar pajak memiliki kesamaan dengan zakat, dimana kewajiban membayar pajak guna adanya pemerataan. Tidak untuk kalangan atas melainkan merata keseluruhan umat. Bedanya membayar zakat dengan pajak ialah jika pajak berupa uang tunai tetapi zakat berupa uang tunai dan barang. Kewajiban membayar pajak ini juga guna kesejahteraan yang ukurannya ditentukan dalam keadaan manusia.

Selain zakat atau ushr yang merupakan salah satu sumber keuangan negara menurut islam, disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang minyak, batubara, timah, emas, dan sebagainya yang menjadi milik negara. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Selain zakat masih bisa dikumpulkan infaq dan shadaqah.

Selain itu, dapat juga berupa pajak yang dapat dikenakan pada semua warga negara, karena sasaran pajak lebih luas, mencakup

segala hal yang dibiayai oleh negara.<sup>49</sup> Pajak yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana untuk kepentingan perjuangan atau negara, secara umum telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

#### 4. Ulama yang Berpendapat bahwa Pajak Diperbolehkan

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi telah melahirkan perdebatan di kalangan para fukaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fukaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemunguan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

##### a. Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharaj,

Menyebutkan bahwa, semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

---

<sup>49</sup> Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah Cetakan Pertama*, (Jakarta: Kencana Pedana Media Group, 2012), h. 63

Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

b. Ibn Taimiyah, dalam Majmuatul Farawa

Mengatakan bahwa Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.

c. Ibn Khaldun dalm Muqaddimma

Mengatakan bahwa dengan cara yang sangat bagus merefleksikan arus pemikiran para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir Ibn Husain kepada anaknya yang menjadi seseorang gubernur di salah satu provinsi: Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa saja pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.<sup>50</sup>

## G. Tinjauan Pustaka

---

<sup>50</sup>Maman Surahman and Fadilah Ilahi, “*KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM*,” (Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol. 1, No. 2, 2017. h. 166–77.

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya – karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteiti dengan judul Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro (2015 – 2019). Tujuannya agar menghindari adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain. Untuk itu penulis menjelaskan topik pertumbuhan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan I Gede Sudarsana, I Nyoman Putra Yasa, I Putu Eka Dianata Marvilianti Dewi, yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Kabupaten Bulengleng Tahun 2015-2018 menyimpulkan bahwa Pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,34% yaitu dari 7,32% menjadi 11,66%. Sementara pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,65% dari 11,64% menjadi 9,99%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan hasil fluktuatif bahkan cenderung menurun. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 114,17% sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2018 sebesar 81,74%. Sementara itu, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria yang sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 111,21% sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2018 sebesar 71,43%. Tingkat kontribusi pajak hotel mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahun dan termasuk dalam kriteria kecil, lalu Sedangkan tingkat kontribusi pajak restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dan masih termasuk dalam kriteria yang kecil.<sup>51</sup>

Persamaan dalam penelitian I Gede Sudarsana, I Nyoman Putra Yasa, I Putu Eka Dianata Marvilianti Dewi, yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulengleng Tahun 2015-2018 dengan penelien penulis ialah sama-sama membahas pajak hotel dan restoran sebagai variable (X) dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variable (Y). Dan Perbedaannya ialah penulis tidak meneliti tingkat kontribusi dan efektifitas pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan juga tidak membahas pajak dalam pandangan perpektif islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Avid Inang Rum, Sisfianne Romadine Susila, Peranan Pajak Hotel Terhadap Pendapatn Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat Menyimpulkan bahwa, Tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2010 sampai dengan

---

<sup>51</sup> I Gede Sudarsana Dkk, "ANALISIS PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015-2018", Vol. 10, no. 2 (2019). h. 10.

2012 setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan. Berdasarkan pembahasan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami penurunan tiap tahunnya dengan jumlah persentase rata-ratanya sebesar 5,07% dikatakan pajak hotel sangat kurang berperan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Kepmendagri berada pada persentase 0,00-10,00%. Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten Bandung Barat sudah cukup baik akan tetapi sosialisasi yang dilakukan belum efektif, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang cara-cara melakukan kewajiban perpajakan serta pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada wajib pajak hotel masih lemah, beberapa wajib pajak hotel masih dapat menghindari dari kewajibannya walaupun telah dilakukan pengawasan dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak hotel yang tepat waktu itu sangat baik dan harus tetap di lanjutkan.<sup>52</sup>

Persamaan dalam penelitian Avid Inang Rum, Sisfianne Romadine Susila dengan peneliti penulis adalah sama dalam membahas tentang konsep pajak daerah yaitu pajak hotel dengan variabel (X) dan Pendapatan asli daerah pada variabel (Y) secara teori. Akan tetapi perbedaannya dengan penelitian penulis tidak membahas tingkat efektivitas pada pajak

---

<sup>52</sup> Avid Inang Rum dan Sisfianne Romadine Susika, "*PERANAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT*", TEDC: Vol.9 No.3, 2015. h.231



hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan tidak membahas terkait pajak dalam perspektif islam.

Penelitian yang dilakukan oleh H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec yang berjudul Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam menyimpulkan bahwa Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak

dibiayai, maka akan timbul kemadaraman. Sedangkan mencegah kemadaraman adalah juga suatu kewajiban.<sup>53</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai pajak dalam konteks padangan islam, dan perbedaannya ialah tidak membahas pengaruh pajak daerah yaitu pajak restoran dan hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh Deden Edward Yoken Bernadin dan Mega Muliawati Pertiwi, yang berjudul Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotek Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kanupaten Bandung, menyimpulkan bahwa Keadaan penerimaan pajak daerah searah dan sejalan dengan penerimaan pajak hotel yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya nilai efektivitas pemungutan pajak hotel, serta potensi dan kontribusi yang memiliki nilai kecenderungan meningkat.

Potensi pajak hotel memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut menandakan bahwa besarnya nilai potensi tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai penerimaan pajak daerah. Efektivitas pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut sejalan dengan penerimaan pajak hotel yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kontribusi pajak hotel memiliki pengaruh yang tidak signifikan berarah negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut menandakan ketika penerimaan

---

<sup>53</sup> H Nur Kholis, S Ag, and M Sh Ec, "PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM," n.d.,h. 24.

pajak daerah meningkat maka kontribusi pajak hotel menurun. Hasil tersebut diperkuat dengan nilai kontribusi pajak hotel yang kecil dibanding dengan kontribusi pajak daerah lainnya. Pengaruh potensi pajak hotel, efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan. Dari hasil tersebut menandakan bahwa potensi pajak hotel, efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel harus dilakukan bersama-sama agar mempengaruhi besarnya nilai penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil perhitungan, variabel efektivitas dinilai lebih dominan dibanding variabel lain.<sup>54</sup>

Persamaan terkait penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah meneliti terkait potensi pajak hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah membahas konsep pajak hotel metode yang dilakukan penulis dan penelitian diatas sama sama menggunakan pendekatan kuantitatif . Perbedaannya tidak membahas terkait tingkat efektivitas pajak hotel lalu tidak membahas terkait pajak restoran dan tidak membahas pajak dalam perspektif ekonomi islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Maman Surahman, Fadilah Ilahi yang berjudul Konsep Pajak Dalam Hukum Islam, yang menyimpulkan bahwa Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak dalam

---

<sup>54</sup> Deden Edwar Yokeu Bernardin and Mega Muliawati Pertiwi, “*Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung*”, (*Jurnal Akuntansi Kajianz Ilmiah Akuntansi (JAK)* Vol. 7, no. 1 January 29, 2020). h. 11.

hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama. Dalam syariat Islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, diwajibkan oleh Uli'l Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan / kekurangan baitul mal, dapat dihapus jikam keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan. Oleh karena pajak dalam Islam, merupakan hasil bentuk ijtihad dari para ulama maka hal ini berimplikasi kepada terjadinya *ikhtilâf* perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai konsep pajak dalam Islam. Terdapat dua pendapat dalam hal ini, pihak yang berpendapat bahwa pajak dibolehkan dalam Islam setelah kewajiban zakat. Pihak lain berpendapat bahwa pajak tidak dibolehkan dalam Islam, karena dalam Islam kewajiban seorang Muslim dalam hal harta hanya ada pada zakat.<sup>55</sup>

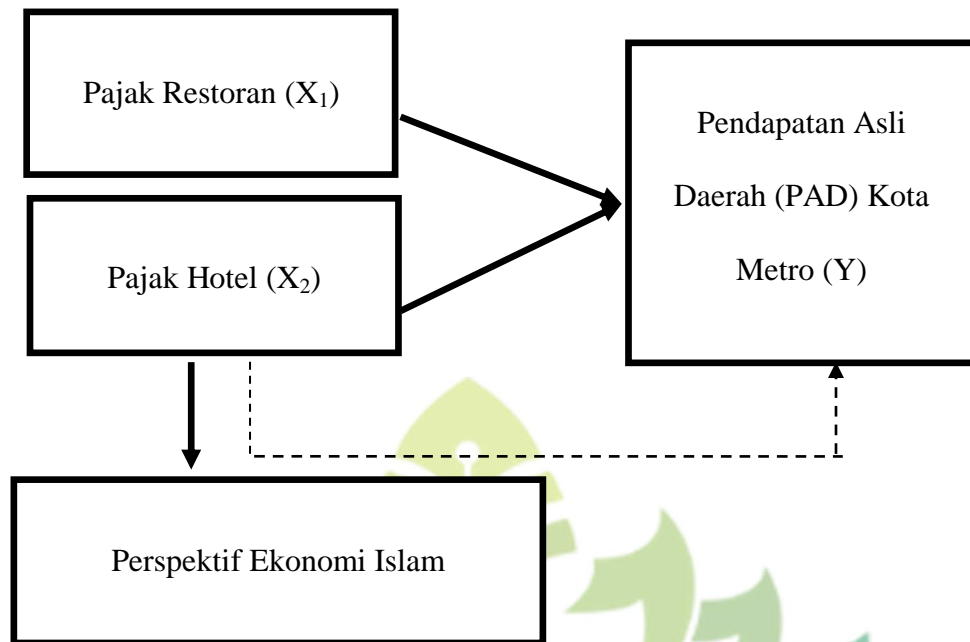
Persamaan dalam penelitian Maman Surahman dengan peneliti penulis ialah membahas pajak dalam pandangan islam, hukum pajak dalam pandangan islam. Perbedaannya tidak membahas pajak dalam ekonomi islam.

## H. Kerangka Berfikir

---

<sup>55</sup> Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (July 31, 2017). h. 166–77.

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berfikir dari penelitian adalah:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

Keterangan :

—————→ : Secara Parsial      - - - - - → : Secara Simultan

Variabel – variabel tersebut antara lain:

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X<sub>1</sub> = Pajak Restoran

$X_2$  = Pajak Hotel

Dalam kerangka berfikir diatas diatas apablia pajak restoran dan pajak hotel menalami peningkatan secara baik, jumlah, dan kulaitas maka akan berdampak pada pendapatan asli daerah dan dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah. Variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif (fakta yang representasikan dalam bentuk angka). Yang berfungsi sebagai variabel bebas (*independen*) adalah variabel Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Sedangkan variabel terikat (*dependen*) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya pemungutan pajak akan dianalisis dalam pandangan Islam.

## I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>56</sup>

Adapun hipotesis hasil penelitian dari :

1. Deden Edwar Yoken Bernardin dan Mega Muiawati Pertiwi yang berjudul Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan, dan Kontribusi

---

<sup>56</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alvabeta, 2012), h. 93.



Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung :

- a. potensi pajak hotel secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung.
- b. Secara parsial hasil variabel potensi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 0,209 atau 20,9%. Dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel ( $0,804 < 2,365$ ) dengan nilai signifikan  $0,452 > 0,05$  berarah positif. Hal ini artinya bahwa potensi pajak hotel secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung.
- c. Secara Parsial kontribusi pajak hotel meningkat maka nilai penerimaan pajak daerah mengalami penurunan, hal tersebut dilihat dari nilai kontribusi pajak hotel yang selalu mengalami kecenderungan naik turun dan nilai kontribusinya tidak melebihi 5% setiap tahunnya.
- d. Secara Simultan pengaruh potensi pajak hotel, efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 73,4% dan sisanya 26,6% faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Dengan nilai tersebut pengaruh yang kuat apabila potensi pajak hotel, efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel secara bersama-sama meningkat sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan, efektivitas pajak hotel memiliki

pengaruh dominan dibandingkan potensi pajak hotel dan kontribusi pajak hotel.<sup>57</sup>

2. Alfian Yanuar dan Sukrisno Agoes yang berjudul Pengaruh PBB, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016:
  - a. Pajak PBB-P2 Memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta pada 2014-2016.
  - b. Pajak Restoran memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta 2014-2016.
  - c. Pajak Hiburan memiliki pengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jarta 2014-2016.<sup>58</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Maman Surahman, Fadilah Ilahi yang berjudul Konsep Pajak Dalam Hukum Islam, yang menyimpulkan bahwa Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak dalam hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama. Dalam syariat Islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan / kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus

---

<sup>57</sup> Bernardin and Pertiwi, "Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap .....", *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)* Vol. 7, no. 1 (January 29, 2020). h.20

<sup>58</sup> Alfian Yanuar dan Sukrisni Agoes, "Pengaruh PBB, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016", *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*: Vol. I, No. 3, (2019). h.953

digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

4. Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah :

- a. Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.
- b. Pajak Reklame mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.
- c. Secara simultan pajak Hiburan dan pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan, ini dikarenakan untuk pendapatan pajak hiburan dan reklame mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.<sup>59</sup>

Hipotesis Pada Penelitian ini adalah:

- a.  $H_0$  : Pajak Restoran berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Metro.

$H_a$  : Pajak Resroran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Metro.

---

<sup>59</sup> Halomoan Sihombing dan Bonifasius H Tambunan, "PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH", JEB: VOL.01, no. 02, (2020), h. 11.

b.  $H_0$  : Pajak Hotel berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Metro.

$H_a$  : Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Metro.

c.  $H_0$  : Pajak Restoran dan Hotel berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Metro.

$H_a$  : Pajak Restoran dan Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Metro.



## DAFTAR PUSTAKA

Albert Kurniawan. 2014 *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta.

Alfian Yanuar dan Sukrisni Agoes. 2019 “*Pengaruh PBB, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap PAD DKI Jakarta 2011-2016*”, Jurnal Multiparadigma Akuntansi: Vol. I, No.7

Amirudin dan Askin Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Atmodjo, M.W. 2005. *Restoran dan Segala Permasalahan*, (Yogyakarta: Andi).

Atteng Jovanly, Saerang Danid, Mawikere Lidya. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015*, Jurnal Berkala Efesiensi, Vol. 16, No. 4.

Baratakusuma Supriyady Deddy dan Salihin Dadang. 2002. *Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka.

Basuki Agus Tri, Prawoto Nano. 2016. *Anlisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Bernardin and Pertiwi. 2020 *“Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap .....”*, *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)* Vol. 7, no. 1.

Bungin M. Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Debdikbut. 2015. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)

Deden Edwar Yokeu Bernardin and Mega Muliawati Pertiwi. 2020. *“Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung”*, (*Jurnal Akuntansi Kajianz Ilmiah Akuntansi (JAK)* Vol. 7, no. 1.

Djaenuri A Aries, *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Bogor : Ghalia Indonesia

Gazali. 2015. *“PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”*, (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*): Vol. VII, No. 1.

Ghozali Imam. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponogoro.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta): PT. Raja Grafindo Persada

H Nur Kholis, S Ag, and M Sh Ec, *“PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM,”* n.d.,

Halomoan Sihombing dan Bonifasius H Tambunan. 2020. "*PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH*", JEB: VOL.01, no. 02.

Huda Nurul dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah Cetakan Pertama* ,(Jakarta: Kencana Pedana Media Group, 2012.

Kementrian Agama RI. 2014. *Al Quran Tajwid dan Terjemah*,Bandung: Diponegoro.

Kementrian Agama RI. 2014. *Al Quran Tajwid dan Terjemah*,Bandung: Diponegoro.

Kepala Badan BPPRD. 2018. *Himpunan Peraturan Walikota Metro Tentang Tata Letak Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet*, (Kota Metro : Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD)).

Kepala Bappeda. 2017. *Glance of Metro City Year 2017*, Kota Metro: BAPPEDA.

Kepala BPPRD. 2018. *Buku Informaasi Daerah*, Kota Metro: BPPRD.

Kholis Nur. 2010 "*Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*", Jurnal Ekonomi Malaysia.



Kosasi, dkk. 2012. *Analisis Sistem Pajak BHTB Dari Pajak Pusa Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang*, Majalah Ilmiah Solusi Unsika, Vol 11 Edisi 24.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Andi OFFSET).

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Memah, Edward W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Manado: Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3.

Muhammad Turmudi. 2015. *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)*, Jurnal Al\_Adl, Vol.8, No.1.

Nasution Edwin Mustofa, et.al. 2010. *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam, cat. Ke-3*, (Jakarta: Prenada Media Group)

Nio Anggun Sripradita, Tipowijono, Achmad Husaini. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)*, Jurnal e-Perpajakan, No. 1 Vol. 1.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

- Purba Rosana, Ginting Rika Mei Hayani. 2014. *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Jurnal Mutiara Akuntansi No. 1 Vol 1.*
- Ramadhani R Aji, dan Fidiani. 2018. *Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah pajak Online, Jurnal Ekonomi / Volume XXIII, No. 03.*
- Rasul Abdul Agung. 2010. *Praktikum Statistika Ekonomidan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Rubiyanto dan Rahayu. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokero Periode 2013-2017, Jurnal Majalah Ekonomi, Vol. XXIV, No. 1.*
- Rum Inang Avid, Susila Romadine Sisfiane. 2015. “*PERANAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT*”, TEDC: Vol.9, No.3,.
- Siahanaan Pahala Maribot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Solimun, Adji Ahmad, Dkk, 2017. *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarPLS*, Malang: UB Press.

Sudarsaba Gede I.dkk. 2019. *Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018*, (Jurnal Akuntansi Profesi, Vol.10 No.2.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Manajemen Penelitian* Jakarta:Rineka Cipta.

Sujarweni Wiratna .V. 2015. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.

Surahman Maman dan Ilahi Fadilah, “*KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM*,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol. 1, No. 2, 2017.

Sutedi Andrian, S.H.,M.H. 2019. *Hukum Pajak*. Jakara: Sinar Grafika.

TIM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 2009. *Pedoman Nasional Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Departemen Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.